

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bone Bolango (Studi Kasus Pada Wisata Hiu Paus Botubarani)

Fauzia P. Pratiwi Yakobu¹, Yanti Aneta², Yacob Noho Nani³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 14 June 2024

Keywords:

Implementasi ; Kebijakan ; Pariwisata

Kata Kunci:

Implementation; Policy; Tourism



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This research aims to understand and describe (1) How is the implementation of the Bone Bolango tourism development policy, specifically in the botubarani whale shark tourism (2) Determining factors for the success of the implementation of Bone Bolango tourism development policy, particularly in botubarani whale shark tourism. The research employs qualitative with descriptive research type. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. Data analysis utilizes the Huberman model. This research also found that implementing the Bone Bolango tourism development policy, particularly in Botubarani whale shark tourism, has been effectively executed according to the planning in RIPPDA Number 2 of 2013. However, the government should plan additional attractions for Botubarani whale shark tourism. The execution has followed the plans, but the local government should pay more attention to the facilities available at Botubarani whale shark tourism, and evaluations are conducted every six months. However, challenges include the formation factor, where there is still a lack of specific information giving structures such as the Tourism Information Center (TIC), and the community has yet to fully exploit the potentials available within this tourism site, such as establishing seafood culinary businesses considering it is a marine/oceanic tourism site.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya pada wisata hiu paus Botubarani serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata hiu paus Botubarani sudah berjalan dengan baik dilihat dari perencanaannya yang telah disusun dalam RIPDA No. 2 Tahun 2013 namun pemerintah sebaiknya merencanakan penambahan daya tarik di wisata hiu paus Botubarani. Pelaksanaan yang telah berjalan sesuai dengan alur perencanaan namun pemerintah daerah lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di wisata hiu paus Botubarani, dan evaluasi dilaksanakan per enam bulan. Namun, kendala yang terdapat pada faktor informasi dimana masih belum terdapat bangunan khusus pemberian informasi yaitu Tourism Information Center (TIC) dan pada pembagian potensi masyarakat belum dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wisata ini, seperti membuat usaha kuliner seafood mengingat wisata ini adalah wisata bahari/Laut.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata sangat penting untuk meningkatkan pendapatan karena Indonesia memiliki keindahan dan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Sebab, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dinilai menguntungkan dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang dijadikan sebagai sumber produktif bagi bangsa dan Negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi obyek wisata dan daya tarik wisata (ODTW) yang beraneka ragam jenis pariwisata misalnya wisata alam baik di darat, laut dan udara, keunikan dan budaya tradisional, peninggalan sejarah/budaya. Potensi yang dimiliki oleh ODTW merupakan sumber daya ekonomi yang sangat bernilai tinggi dan merupakan media pendidikan pelestarian lingkungan yang berperan penting dalam pengembangan kepariwisataan dan sebagai sumber ekonomi masyarakat maupun daerah.

*Corresponding author

Email: yakobusfauzia@gmail.com¹, yantianeta@ung.ac.id², yacobnani@ung.ac.id³

Sesuai dengan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan memaksimalkan potensi objek wisata yang ada di enam kabupaten di Provinsi Gorontalo, salah satunya di kabupaten Bone Bolango. Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Bone Bolango difokuskan pada beberapa kebijakan, antara lain:

a.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; b.) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata; c.) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2013 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031. Aspek lain yang tidak kalah penting dalam mendorong pengembangan wisata adalah kesiapan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Saat ini wisata bahari dan alam menjadi andalan wisata Kabupaten Bone Bolango. Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango cukup menggugah minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata yang sudah ada. Tak hanya wisatawan dalam negeri yang banyak mengunjungi wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango, wisatawan mancanegara juga terpantau banyak yang berkunjung untuk berwisata di Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 1 Data Pengunjung Wisata Hiu Paus Botubarani Tahun 2020-2023

No.	TAHUN	WISNU	WISMAN
11.	2020	8.445	525
2.	2021	12.332	26
3.	2022	7.415	649
4.	2023	28.464	1.288
JUMLAH		56.666	2.488

Sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango 2023

Berdasarkan tabel 1 Dapat dilihat bahwa objek wisata hiu paus botubarani merupakan obek wisata yang paling digemari oleh wisatawan mancanegara. Hal ini dapat dilihat di tahun 2020 memperoleh 525 wisatwan mancanegara, sedangkan tahun 2021 memperoleh 26 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wisata hiu paus Botubarani disaat wisata yang lain hanya didatangi oleh sedikit wisatawan mengingat pada tahun itu Indonesia dan seluruh dunia dikagetkan dengan adanya virus covid-19, dan pada tahun 2022 memperoleh kenaikan yang cukup signifikan yaitu 649 , pada tahun 2023 juga jumlah wisatwan mancanegara mencapai 1.288 wisatawan. Menjadikan hiu paus botubarani sebagai salah satu pengunjung wisatawan mancanegara terbanyak di Bone Bolango .

Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu objek daya tarik wisata (ODTW) di Provinsi Gorontalo telah menetapkan di dalam rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabuoaten Bone Bolango tahun 2011-2031 Pasal 22 sebagai dasar pengembangan Wisata Kabupaten Bone Bolango tentang bagaimana arah kebijakan pengembangan pariwisata sebagai berikut,:

1) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata melalui pendidikan formal dan informal. 2) Pembinaan Sistem Pelayanan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku pariwisata dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata.

Di samping itu sesuai pengamatan langsung peneliti menemukan dalam pengembangan pariwisata yang ada di Desa Botubarani masih terdapat kendala atau masalah yang dihadapi seperti a) Belum Memadai Infrastruktur yang ada wisata Hiu Paus, Seperti : Kurangnya lahan parkir dan jalan masuk yang belum representative b) Kualitas sumber daya manusia (masyarakat setempat) yang masih minim dan belum mampu mengembangkan potensi usaha nyang ada disekitar hiu paus Botubarani, serta kurangnya penguatan kebijakan dan sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat setempat;. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model implementasi kebijakan pengembangann kepariwisataan di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam peneltian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan 1) Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek wisata hiu paus botubarani di Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek : a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Evaluasi, dan 2) Faktor yang Menentukan Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek wisata hiu paus botubarani di Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari aspek : a) Kemampuan Organisasi, b) Informasi, c) Dukungan, d) Pembagian Potensi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik (*public policy*) dalam dimensi proses, Lingkungan kebijakan, hirarki dan aktor kebijakan publik khususnya dalam system pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan hal penting untuk diketahui sebagai pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (Kadji, 2015), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah politik atau pemerintah. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan telah banyak membantu para pelaksana dalam tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik, dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bias saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures* (SOPs), maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Dalam dimensi implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman mendalam tentang studi kebijakan publik, yang dalam perkembangan keilmuannya bermuara dalam dua perspektif: i) Perspektif Politik, dan ii) Perspektif Administrasi Publik.

Berkenaan dengan domain implementasi kebijakan tersebut, Edwards III (1980:1) menegaskan bahwa: *The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.*

Warwic mengatakan bahwa: "Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kemampuan Organisasi,
- b) Informasi,
- c) Dukungan, dan
- d) pembagian potensi

Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (Standard Operating Procedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

c. Dukungan, kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

d. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk ciri-ciri di luar pariwisata yang berhubungan secara langsung akan hubungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996) terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu:

- a. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi situs yang tadinya tidak di gunakan sebagai atraksi.
- b. Tujuan baru, membangun atraksi di situs yang sebelumnya telah di gunakan sebagai atraksi.

- c. Pengembangan baru yang secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang telah di bangun untuk memikat perhatian pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat meraih pasar yang lebih luas, dengan mencapai pangsa pasar yang baru.
- d. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung dan mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.
- e. Penciptaan kegiatan baru atau aspek-aspek dari suatu kegiatan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dan memerlukan modifikasi bangunan dan sistem.

Dalam pengembangan pariwisata terdapat tahapan-tahapan untuk mendukung pengembangan tersebut. Adapun tahapan-tahapannya yaitu:

1) Aspek Fisik

Menurut UU RI No 23 tahun 1997 dalam Marsongko (2001), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua daya, daya keadaan dan makhluk hidup yang terdapat didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang termasuk dalam lingkungan fisik berdasarkan dari beberapa sumber adalah:

- a. Geografi meliputi luas kawasan, luas area yang terpakai, batas alam dan batas administrasi
- b. Topografi merupakan gambaran permukaan suatu daerah khususnya konfigurasi dari kemiringan lahan seperti dataran berbukit dan pegunungan yang menyangkut ketinggian dengan rata-rata dari permukaan laut
- c. Geologi yang penting di pertimbangkan termasuk jenis material tanah, serta erosi dan kesuburan tanah daya serap.
- d. Limatologi termasuk temperature udara, curah hujan, kelembaban, kekuatan tiupan angin dan penyinaran matahari secara merata dan variasi musim.
- e. Hidrologi terdapat di dalamnya karakteristik dari daerah aliran sungai, abrasi, pantai dan laut seperti arus.
- f. Visability menurut Salim (1985; 2239), yang di maksud visibility adalah pemandangan dari ujung jalan yang kanan kirinya pepohonan yan berbaris secara teratur (barisan pepohonan yang panjang).
- g. Vegetasi dan wildlife daerah habitat yang perlu di pertimbangkan untuk menjaga kelangsungan secara hidup vegetasi dan kehidupan secara liar untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

2) Aspek daya Tarik pariwisata

Dapat berkembang di suatu tempat pada dasarnya karena tempat tersebut memiliki daya Tarik dan mampu mendorong wisatawan untuk datang mengunjunginya. Gunn (1979;50) menyebutkan "*a thing or feature which draws appealing to their desires, etc expecially interesting or amusing exhibition which „draws“ crowds*". Gunn juga berpendapat bahwa "*attraction are the on-location places in region that only provide the things for tourist to see and do but also offer the lure to trevel*".

3) Aspek Aksesibilitas

Komponen infrastruktur yang sangat penting dalam destinasi adalah aksesibilitas. Aksesibilitas menurut Bovy dan Lawson (1998; 107) "*should be passible by public transfort and bicycle trails, by padestarian paths (from neighborhoods) and by cars*. Akses yang berkarakter fisik maupun non fisik untuk menuju suatu destinasi adalah hal penting dalam pengembangan pariwisata, aspek-aspek fisik yang menyangkut dengan jalan, dan kelengkapan fasilitas, frekuensi transformasi umum dan terminal terdekat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada ojek wisata Hiu Paus Botubarani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Responden yang akan diwawancarai yaitu Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, Kelompok Sadar Wisata, Pengelola Pangkalan, dan Pengunjung. Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari jurnal, buku, Data Pengunjung, dan website.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data Triangulasi (Abdussamad, 2021) seperti pada Gambar 2 berikut:

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dikutip oleh (Sugiyono, 2018) yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di Wisata Hiu Paus Botubarani. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Mei 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo, di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Desa Botubarani merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki wilayah pesisir. Wilayah pesisir desa Botubarani terdiri atas tiga dusun yaitu Dusun Tambo Timur, Dusun Tambo Tengah dan Dusun Tambo Barat. Botubarani adalah wilayah yang termasuk dalam zona pariwisata, yang dimana di dalam Desa Botubarani terdapat sebuah tempat wisata yang sangat luar biasa. Wisata ini bernama Hiu Paus Botubarani. Perairan Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, adalah salah satu kawasan diduga munculnya Hiu Paus setiap hari. Menurut nelayan setempat, waktu kemunculan Hiu Paus di perairan tersebut adalah saat nelayan sedang menjaring ikan Nike (*Awaous melancephalus*). Sementara itu, ada pula yang menyebutkan bahwa kemunculan Hiu Paus di perairan Botubarani akibat pemberian makan secara sengaja berupa kepala dan kulit udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) melalui aktivitas wisata.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bone Bolango (Studi kasus Pada Wisata Hiu Paus Botubarani)

Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya untuk merangsang pertumbuhan suatu negara di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Sedangkan pengembangan pariwisata terdiri dari serangkaian inisiatif untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya yang mendukung kegiatan pariwisata agar lebih efisien dan optimal. Pembangunan dan upaya pembangunan tentunya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan seluruh praktik pembangunan di daerah, termasuk kawasan wisata. Penjelasan mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dijabarkan berikut ini:

Perencanaan Tahap awal dari perencanaan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya Hiu Paus Botubarani adalah penetapan regulasi sebagai pedoman. Seperti yang diungkapkan oleh Harahap & Wicaksono (2016) dalam jurnalnya bahwa sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi. Maksudnya, semua kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum atau perundang-undangan. Dengan begitu pemerintah memiliki wewenang dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengembangan kebijakan di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di objek wisata Hiu Paus, telah berjalan sesuai dengan alur perencanaan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan tersebut telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 yang menjadi landasan hukum dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Dengan berjalannya perencanaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal ini menunjukkan konsistensi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dalam pengembangan kebijakan pariwisata di Bone Bolango, termasuk di objek wisata Hiu Paus, dapat dipastikan telah melalui proses yang sesuai dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan adalah tindakan merealisasikan perencanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum pada organisasi dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen teknis pelaksanaan, sehingga secara otomatis dapat diefektifkan (Kadji, 2008). Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terkait dengan pelaksanaan pengembangan pariwisata di Hiu Paus Botubarani sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, Kelompok Sadar Wisata, Pengelola Wisata, dan masyarakat sekitar. Dalam proses pelaksanaan pengembangan pariwisata di Hiu Paus Botubarani ini masih menemui sedikit kendala seperti tempat parkir yang belum memadai, kurangnya tempat sampah, dan masyarakat belum mampu memanfaatkan fasilitas yang ada.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango telah berjalan secara optimal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, antara lain kurangnya ketersediaan tempat parkir yang memadai, kekurangan fasilitas tempat sampah, dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Ketersediaan tempat parkir yang memadai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengalaman wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Dengan kurangnya tempat parkir yang memadai dapat mengakibatkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Selain itu, kekurangan tempat sampah juga dapat menjadi masalah serius dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar objek wisata. Diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas tempat sampah serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Evaluasi merupakan proses akhir dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata Hiu paus Botubarani. Pada hakikatnya, setelah direncanakan dan dilaksanakan suatu kebijakan harus dilakukan evaluasi. Tahap ini penting dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan ini, Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Pariwisata, dan Kelompok sadar wisata sudah berupaya agar pengembangan wisata hiu paus sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pengunjung wista yang telah mengunjungi wisata hiu paus Botubarani. Temuain ini ditandai dengan temuan Pasolong, (2016) bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat evektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan. Dimana tingkat efisiensi tersebut berorientasi pada upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terkait evaluasi diperoleh bahwa pengembangan wisata masih belum maksimal dan masih perlu mendapat perhatian pada fasilitas-fasilitas yang ada sehingga kedepannya hal tersebut menjadi sebuah kendala yang harus dilakukan evaluasi oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, Kelompok Sadar Wisata, dan Pengelola Wisata. Evaluasi pada wisata hiu paus Botubarani dilakukan 6 Bulan sekali dan dihadiri oleh Perwakilan DInsa Pariwisata Pemuda dan Olalahraga, Kelompok Sadar Wisata(POKDARWIS), Pengelola Pangkalan, Masyarakat, Pemerintah Desa, Pihak Polsek, dan Tentara Angkatan Laut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di objek wisata Hiu Paus Botubarani, sangat penting untuk dilakukan. Evaluasi ini diperlukan guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai semua permasalahan yang muncul setelah dilaksanakan pengembangan pariwisata. Dengan melakukan evaluasi secara komprehensif, pihak terkait dapat mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik objek wisata Hiu Paus Botubarani.

Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bone Bolango (Studi Kasus Pada Wisata Hiu Paus Botubarani)

Proses kebijakan yang telah dipilih oleh *policy makers*, tidak menjamain bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya. Artinya, keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada cara atau strategi implementator dalam melaksanakannya. Pernyataan ini, sejalan dengan teori Kadji(2015) bahwa kebijakan publik berorientasi pada tataran bagaimana merealisasikan program tersebut. Ada banyak faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pengembangan potensi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata Hiu Paus Botubarani. Adapun pembahsan atas hasil penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Kemampuan Organisasi

a. Kemampuan Teknis organisasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki untuk melaksanakan fungsi teknis organisasi. Dalam kajian ini, kemampuan teknis organisasi merupakan kemampuan organisasi lintas sektoral yang tergabung dalam penyelenggaraan wisata. olehnya itu dapat dikatakan bahwa kemampuan organisasi ditentukan oleh kerja Tim Teknis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terkait dengan spesialisasi fungsi yang ada. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan kemampuan teknis Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis dalam pengelolaan objek wisata Hiu Paus Botubarani telah berjalan dengan baik. Pengamatan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan di objek wisata tersebut telah berjalan sesuai dengan kemampuan teknis organisasi, meskipun sempat terjadi reformasi birokrasi di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Bone Bolango. Kemampuan teknis yang baik dalam dinas pariwisata tersebut memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di objek wisata Hiu Paus Botubarani dapat berjalan lancar dan efisien. Meskipun mengalami reformasi birokrasi, dinas pariwisata tetap mampu menjaga kualitas pelayanan dan pengelolaan objek wisata dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme dari pihak terkait dalam menjalankan tugasnya serta kesiapan dalam menghadapi perubahan organisasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait kemampuan teknis Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango dalam mengelola objek wisata Hiu Paus Botubarani, dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis tersebut telah berjalan dengan baik. Meskipun mengalami reformasi birokrasi, dinas pariwisata tetap mampu menjaga kualitas pelayanan dan pengelolaan objek wisata dengan efisien. Hal ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme dari pihak terkait dalam menjalankan tugasnya serta kesiapan dalam menghadapi perubahan organisasi.\

b. Kemampuan Koordinasi Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, suatu organisasi harus mampu membangun hubungan dengan organisasi lain yang bekerja di bidang yang sama. Oleh karena itu, Warwick menambahkan perlu adanya koordinasi antar instansi terkait. Dinas pariwisata pemuda

dan olahraga Kabupaten Bone Bolango sebagai organisasi publik yang bekerja pada sektor pariwisata. Kemampuan koordinasi dinas pariwisata merujuk pada kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pengelola wisata, kelompok sadar wisata, dan masyarakat lokal, dan lembaga terkait lainnya, guna mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang lebih baik. Dengan kemampuan koordinasi yang baik, dinas pariwisata dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kemampuan ini juga memungkinkan dinas pariwisata untuk mengelola konflik kepentingan dan membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan pariwisata. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, kemampuan koordinasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa koordinasi di dalam dinas pariwisata tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan di objek wisata Hiu Paus Botubarani, di mana setiap kegiatan yang dilakukan telah terkoordinasi dengan baik antara pengelola wisata, kelompok sadar wisata, dan pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango yang bertempat di lokasi wisata Hiu Paus Botubarani.

Dari pengamatan langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koordinasi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango dalam mengelola objek wisata Hiu Paus Botubarani telah berjalan dengan baik. Koordinasi yang harmonis antara dinas pariwisata, pengelola wisata, kelompok sadar wisata, dan pegawai terkait telah memungkinkan terlaksananya kegiatan-kegiatan di objek wisata dengan sinergi dan efisiensi yang tinggi. Kerjasama yang terjalin dengan baik antara berbagai pihak tersebut memberikan dampak positif dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata, memastikan bahwa setiap kegiatan terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya koordinasi yang efektif, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan wisata, menjaga keberlanjutan pengelolaan objek wisata, serta memberikan pengalaman wisata yang memuaskan bagi pengunjung yang datang ke wisata Hiu Paus Botubarani.

Informasi sangat penting karena kurangnya informasi dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Informasi dibangun melalui koordinasi antar pihak yang terlibat langsung dalam implementasi. Menurut Warwick bahwa dalam implementasi kebijakan, informasi merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh organisasi untuk merubah program saat dijalankan. Itu artinya harus ada proses evaluasi. Hal ini diistilahkan oleh Warwick dengan Kecerdasan Berkelanjutan. Menurut Warwick(1992) keputusan tersebut antara lain keputusan tentang konten dan desain; keputusan tentang tugas utama yang harus dilakukan dan teknologi yang akan digunakan; struktur organisasi; pelaksana lapangan yang bertanggungjawab atas tindakan; dan sasaran program, yakni mereka yang akan menerima programnya. Informasi merupakan proses penyampaian informasi kepada setiap pengunjung. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, informasi merupakan faktor yang sangat diperlukan. Informasi yang dilaksanakan pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata hiu paus Botubarani terdiri dari penyampaian melalui baliho, spanduk, website, instagram dan tiktok. Selain itu, informasi dalam bentuk promosi pariwisata juga sangat perlu untuk dilakukan terhadap upaya mempromosikan objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa informasi terkait objek wisata Hiu Paus Botubarani disebarkan melalui berbagai media, seperti baliho, spanduk, website, dan media sosial. Informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengunjung mengenai jumlah hiu paus yang ada di lokasi tersebut, serta informasi terkait jumlah hiu paus yang dapat ditemui setiap bulannya. Dengan ketersediaan informasi ini, pengunjung menjadi lebih mudah untuk mengakses dan memahami informasi-informasi yang disediakan, sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisata mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pengelola wisata telah mengurangi aktivitas promosi langsung terkait wisata Hiu Paus Botubarani, mengingat peningkatan signifikan jumlah pengunjung wisata yang terjadi saat ini. Saat ini, promosi lebih banyak dilakukan secara tidak langsung melalui pengunjung sendiri, serta melalui kehadiran artis atau konten kreator yang mengunjungi lokasi wisata ini. Melalui promosi tidak langsung ini, wisata Hiu Paus Botubarani mendapatkan eksposur yang lebih luas dan dapat menarik minat lebih banyak pengunjung untuk mengunjungi destinasi tersebut, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan yang ada di objek wisata Hiu Paus Botubarani.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa informasi terkait objek wisata Hiu Paus Botubarani disampaikan melalui berbagai media seperti baliho, spanduk, website, dan media sosial. Informasi ini membantu pengunjung untuk memahami jumlah hiu paus yang ada di lokasi dan informasi terkait keberadaan hiu paus setiap bulannya, sehingga memudahkan pengunjung dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain itu, kesimpulan dari penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pengelola wisata cenderung mengurangi promosi langsung terkait wisata Hiu Paus Botubarani karena peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan. Promosi kini lebih banyak dilakukan secara tidak

langsung melalui pengunjung sendiri dan kehadiran artis atau konten kreator yang mengunjungi lokasi wisata tersebut. Pendekatan promosi tidak langsung ini memberikan eksposur yang lebih luas bagi wisata Hiu Paus Botubarani dan berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut.

Dukungan Masyarakat pada implementasi kebijakan mencakup antara lain berupa dukungan masyarakat sekitar dalam pengembangan wisata hiu paus Botubarani. Menurut Donald P. Warwick (Tahir, 2015) dalam implmentasi kebijakan faktor dukungan yang perlu diperhatikan yaitu jika adanya kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka. Dalam pengembangan wisata hiu paus botubarani dukungan masyarakat sangat diperlukan karena wisata ini berbasis masyarakat. Dukungan dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata, terutama di Kabupaten Bone Bolango, telah menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat positif. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ada, seperti fasilitas kios souvenir yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks usaha pariwisata sebagai salah satu penunjang sumber ekonomi lokal, kurangnya pemanfaatan fasilitas tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan jiwa wirausaha yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelolanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di Bone Bolango, khususnya di objek wisata Hiu Botubarani, telah sangat baik. Hal ini tercermin dari upaya kelompok sadar wisata dan pengelola wisata dalam menginisiasi program-program seperti pemberian sembako dan pembagian daging qurban saat hari raya Idul Adha sebagai bentuk terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembagian Potensi Usaha Pembagian potensi sangat diperlukan untuk pengembangan wisata. Jika pembagian potensi tidak sesuai dengan potensi maka dapat menghambat proses implementasi kebijakan pengembangan wisata. Menurut Donald P. Warwick (Tahir, 2015) dalam implmentasi kebijakan faktor pembagian potensi yang perlu diperhatikan yaitu pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan. Dalam pengembangan wisata hiu paus Botubarani pembagian potensi dilakukan untuk menyesuaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan pengamatan langsung, pembagian potensi di objek wisata Hiu Paus Botubarani telah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, terdapat kendala yang perlu diperhatikan terutama dalam potensi usaha, khususnya dalam sektor kuliner. Mengingat wisata Hiu Paus Botubarani merupakan destinasi bahari/laut, seharusnya terdapat peluang besar untuk pengembangan usaha kuliner seafood yang dapat menarik minat wisatawan. Namun, disayangkan bahwa di objek wisata Hiu Paus Botubarani, masyarakat hanya menjual makanan cepat saji tanpa menawarkan keunikan kuliner laut yang seharusnya menjadi daya tarik tersendiri.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pembagian potensi terkait implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di objek wisata Hiu Paus Botubarani, masih belum optimal. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi usaha kuliner di destinasi ini guna memaksimalkan potensi pariwisata bahari/laut yang dimiliki oleh daerah tersebut.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah : 1. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di objek wisata Hiu Paus Botubarani, telah berjalan cukup optimal. Hal ini terlihat dari keseriusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031. 2. Adapaun hasil penelitian dilapangan mengenai sub fokus terkait dengan faktor penentu keberhasilan, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya pada wisata hiu paus Botubarani ada yang belum optimal yaitu Pembagian Potensi dikarenakan masyarakat masih belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi usaha kuliner yang ada diwisata hiu paus Botubarani

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah: 1. Dalam faktor Perencanaan, Sebaiknya pemerintah daerah dan desa bekerja sama untuk merencanakan penambahan daya tarik di objek wisata Hiu Paus Botubarani dengan mengembangkan fasilitas dan aktivitas yang dapat menarik minat pengunjung, seperti pengenalan lebih mendalam tentang kehidupan

laut dan konservasi, penyediaan wahana rekreasi yang menarik, dan Usaha Kuliner seafood. Dengan langkah ini, diharapkan objek wisata Hiu Paus Botubarani dapat menjadi destinasi yang lebih menarik dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata lokal dan ekonomi masyarakat sekitar. 2. Dalam faktor Pelaksanaan, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di wisata hiu paus Botubarani, dengan menambah area parkir yang sebelumnya masih kurang memadai dan terasa tidak aman, dan pemerintah daerah lebih menambah fasilitas seperti kamar mandi bilang yang masih kurang mengingat wisata hiu paus sangat banyak diminati oleh wisatawan. 3. Dalam faktor Informasi, sebaiknya pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk membangun Tourism Information Center (TIC) sebagai upaya untuk meningkatkan layanan informasi kepada wisatawan. Dengan adanya Tourism Information Center (TIC) diharapkan akan tercipta pengalaman wisata yang lebih menyenangkan dan informatif bagi pengunjung. 4. Dalam Faktor Pembagian Potensi, Sebaiknya masyarakat dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wisata ini, seperti membuat usaha kuliner sehingga terdapat peluang besar untuk mengembangkan berbagai jenis kuliner seafood yang dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan daya tarik wisata secara keseluruhan.

REFERENSI

- Abdussamad, J., & A. Hurudji, P. W. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(2), 157–178. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.299>
- Abdussamad, Z. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. In *CV. Syakir Media Press* (1 ed., Vol. 4, Nomor 1). CV. Syakir Media Press.
- Bupati Bone, & Bone. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Bone Bolango 2011-2035*.
- Fithra, H., & Akmal, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak* (Vol. 2, Nomor 1).
- Japri, M., Aisyah, S., & Trisnomurti, R. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Kalimantan Timur. *Collegium Studiosum*, 3(1), 56–63.
- Kadji, Y. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Prespektif Realitas*. Tulungagung: Penerbit Cahaya Abadi.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Tahir. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandun: ALFABETA, CV.
- Wiseza, F. C. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Bukit Khayangan Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*. 4, 89–106.
- Wismayanti, K. W. D. (2020). Implementasi Kenijakan Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Kearifan Lokal Di Bali (Studi kasus: Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2020.v02.i01.p05>